



Media: Tribun Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 01 Februari 2017

Halaman: 13

Tolak Politik Uang dengan Bakar 1.000 Amplop

YOGYA, TRIBUN - Sedikitnya 1.000 amplop dibakar di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta, Selasa (31/1). Pembakaran 1.000 amplop itu dilakukan oleh jaringan pemilih pemula (JPP) Yogyakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat. Mereka mengkampanyekan menolak *money politics* atau politik uang selama proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017.

Terik matahari tak menyurutkan para pemuda yang mayoritas mahasiswa untuk melakukan pembakaran 1.000 amplop. Pembakaran sekitar 1.000 amplop itu diawali dengan orasi dari JPP yang terdiri dari para pemilih pemula. Aksi ini dilakukan di kantor KPU setempat karena mereka gerah melihat dinamika Pilkada di berbagai

daerah yang selalu ada politik uang untuk membeli suara rakyat.

Dalam aksinya, anggota JPP membawa berbagai poster bertuliskan "Pilih bersih tanpa *money politics*". "Jogja Tolak Calon Lintah Darat (Linda). Arep dadi nyebar duit wis dadi nyebar duit". Mereka kemudian mengajak panwaslu dan KPU untuk turut membakar ribuan amplop sebagai simbol pemberantasan pada politik uang. Menurut mereka pelaksanaan pesta demokrasi akan tercoreng karena adanya politik uang tersebut.

"Kami menolak para calon pemimpin yang sifatnya seperti bank plecit. Yakni, memberikan uang pada rakyat, namun saat berkuasa dia membungakan uang itu dan mengeruk uang rakyat," tegas Ardy Sythab, Koordinator

Kami menolak para calon pemimpin yang sifatnya seperti bank plecit

Tolak Politik Uang

• Sambungan Hal 13

aksi damai tersebut.

Ardy menjelaskan, adanya politik uang akan membuat masyarakat semakin pragmatis. Sehingga, rasa kritis pada program calon pemimpin akan menjadi tumpul. Apalagi, bagi pemimpin hal ini akan menghasilkan produk kebijakan yang tidak pro pada rakyat kecil.

Pihaknya pun menyerukan tiga hal dalam aksi damai ini. Di antaranya adalah pihaknya memperingatkan calon kepala daerah khususnya Yogyakarta untuk jangan sekali-kali melakukan praktik politik uang. Kedua, pihaknya mengajak KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas Pilkada dapat menyelenggarakan Pilkada yang transparan, bersih dan akuntabel. Serta bertindak tegas para pelaku politik uang.

"Kami juga mengajak segenap masyarakat untuk bersama-sama memerangi poli-

tik uang dan menolak dengan tegas para calon yang melakukan praktik ini," ujarnya.

Sanksi pidana

Komisiner Panwaslu Kota Yogyakarta Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar-Lembaga, Iwan Ferdian menyatakan hingga kini pihaknya belum menerima laporan adanya politik uang yang dilakukan oleh tim sukses paslon wali kota yang bertarung di Pilkada 15 Februari mendatang. Meski demikian, dia mengancam penerima maupun pemberi politik uang akan terancam sanksi pidana.

Seperti yang tertuang dalam Undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 pasal 187 a tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ditegaskan soal sanksi berat terhadap pelaku politik uang dengan kurungan 36 bulan sampai 72 bulan penjara dan denda Rp200 juta sampai Rp1 miliar.

"Balik pemberi dan penerima akan terkena sanksi pidana. Maka, kami ajak masyarakat untuk bisa memerangi politik uang. Kalau ada praktik ini, jangan segan-segan

laporkan pada kami," ujar Iwan.

Menurut Iwan, selain sanksi pidana, pemberi dan penerima uang juga dengan tujuan mempengaruhi suara juga bisa membatalkan pasangan calon kepala daerah. Adapun dia menyebut beberapa bentuk politik uang yang biasanya terjadi di daerah.

"Misalnya ada kegiatan pembangunan, paslon tertentu menjanjikan akan memberi bantuan semen. Atau juga ada beberapa alat untuk kepentingan ibu-ibu PKK. Ini *money politics* yang tidak hanya berupa amplop," jelasnya.

Komisiner KPU Kota Yogyakarta, Bidang Pendidikan Politik dan Humas, Sri Surani menjamin jika KPU sebagai penyelenggara Pilkada tetap menjaga komitmen dan integritas dalam Pilkada. Mereka juga terus mengajak masyarakat untuk berani menolak segala bentuk politik uang.

"Kami tetap menjaga independensi kami. Jika memang ada temuan politik uang di masyarakat, warga harus berani melaporkan," ucap Ruri. (als)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005